Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar,

ISSN Cetak : 2477-2143 ISSN Online : 2548-6950 Volume 10 Nomor 2, Juni 2025

PENDIDIKAN INKLUSIF DI INDONESIA: STUDI PUSTAKA ATAS PERKEMBANGAN, TANTANGAN, DAN STRATEGI IMPLEMENTASI

Debi Yanti Nahampun¹, Fatma Nabila², Nabila Br Surbakti^{3,} Erra Fazira MT⁴, Afif Arahman⁵, Lili Tansliova⁶

1,2,3,4,5,6</sup>Universitas Negeri Medan

¹debiyantin@gmail.com,²nabilafatma985@gmail.com,
 ³nabilasurbakti91@gmail.com. ⁴errafazirah0144@gmail.com,
 ⁵afifarahman88@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the development, challenges, and implementation strategies of inclusive education in Indonesia. Inclusive education is a fundamental right that ensures all individuals, including those with special needs, have access to quality education without discrimination. Despite the existence of various national policies supporting inclusive education, significant barriers remain in practice, including limited resources, inadequate teacher training, and persistent social stigma towards children with special needs (CWSN). This literature review aims to identify the key challenges faced in the implementation of inclusive education and to propose effective strategies based on recent academic research. The findings reveal a gap between policy and practice, highlighting the need for comprehensive approaches that address both theoretical frameworks and practical solutions. The study contributes to the ongoing discourse on inclusive education by providing actionable recommendations for policymakers, educators, and stakeholders to enhance the quality and accessibility of education for all students in Indonesia.

Keywords: education policy, inclusive education, special needs education, implementation strategy

ABSTRAK

Studi ini mengkaji perkembangan, tantangan, dan strategi implementasi pendidikan inklusif di Indonesia. Pendidikan inklusif merupakan hak dasar yang menjamin semua individu, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus, memiliki akses terhadap pendidikan berkualitas tanpa diskriminasi. Meskipun terdapat berbagai kebijakan nasional yang mendukung pendidikan inklusif, masih terdapat hambatan signifikan dalam praktiknya, termasuk keterbatasan sumber daya, pelatihan guru yang tidak memadai, dan stigma sosial yang terus berlanjut terhadap anak berkebutuhan khusus (ABK). Tinjauan pustaka ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi pendidikan inklusif dan mengusulkan strategi efektif berdasarkan penelitian akademis terkini. Temuan penelitian ini mengungkap adanya kesenjangan antara kebijakan dan praktik, yang

menyoroti perlunya pendekatan komprehensif yang membahas kerangka kerja teoritis dan solusi praktis. Studi ini berkontribusi pada wacana berkelanjutan tentang pendidikan inklusif dengan memberikan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti bagi para pembuat kebijakan, pendidik, dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan bagi semua siswa di Indonesia.

Kata Kunci: kebijakan pendidikan, pendidikan inklusif, pendidikan kebutuhan khusus, strategi implementasi

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan hak fundamental setiap dan individu menjadi pondasi penting dalam membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Dalam konteks ini, pendidikan inklusif muncul sebagai pilar utama yang menjamin bahwa semua individu, tanpa terkecuali, termasuk yang memiliki kebutuhan khusus, mendapatkan akses pendidikan serta pembelajaran yang tanpa diskriminasi. Belajar adalah menghasilkan penyesuaian tingkah laku dan perubahan prilaku sebagai hasil dari pengalaman. Maka dari itu belajar butuh proses penyesuaian dari perubahan tingakah laku sebagai hasil dari pengalaman (Amalia, Nadra & Kemal, 2022). Konsep pendidikan inklusif menuntut terciptanya lingkungan belajar yang ramah dan mendukung bagi semua peserta didik, sehingga mampu mewujudkan kesetaraan dan keadilan dalam sistem pendidikan nasional.

Di Indonesia, pendidikan inklusif telah diformulasikan melalui berbagai kebijakan nasional, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional peraturan-peraturan terkait. dan Namun demikian, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi berbagai signifikan. kendala Faktor-faktor seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya pelatihan dan kesiapan guru, serta stigma sosial yang masih melekat terhadap anak berkebutuhan (ABK) menjadi hambatan khusus utama menyebabkan kesenjangan dan kebijakan implementasinya. Kondisi ini mengindikasikan perlunya kajian mendalam guna memahami secara komprehensif tantangantantangan tersebut.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menggali dan mengidentifikasi masalah-masalah mendasar yang menghambat efektivitas pendidikan inklusif di Indonesia. Mengingat hak pendidikan

adalah hak asasi yang harus dipenuhi oleh negara dan masyarakat, penelitian ini sangat penting untuk mengevaluasi implementasi kebijakan telah diterapkan yang serta merumuskan strategi strategis yang dapat mengatasi hambatan tersebut. demikian, Dengan penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperbaiki kualitas dan akses pendidikan bagi ABK dan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif.

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau literatur terkini mengenai perkembangan pendidikan inklusif di Indonesia, mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi di lapangan, merumuskan strategi implementasi efektif berdasarkan hasil penelitian akademik terbaru. Kebaruan penelitian terletak pada pendekatan komprehensif yang tidak hanya berfokus pada kebijakan, tetapi juga mengangkat isu praktis dan solusi inovatif yang belum banyak diulas dalam studi-studi terdahulu. Dengan membandingkan hasil temuan terbaru penelitian sebelumnya, dengan memperlihatkan perbedaan signifikan pemahaman dan implementasi pendidikan inklusif yang lebih adaptif terhadap kondisi riil di lapangan.

Menurut Ainscow dan Miles (2009), pendidikan inklusif adalah "a process of increasing the participation of students in, and reducing their exclusion from, the cultures, curricula and communities of local schools." Di Indonesia, pendidikan inklusif sebagai sistem penyelenggaraan pendidikan memberikan kesempatan yang kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk pendidikan mengikuti atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Secara teoritis, penelitian ini menggunakan kerangka Teori Landasan Hukum dan Kebijakan Landasan hukum dengan pelaksanaan pendidikan inklusi di Indonesia cukup kuat. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menegaskan hak penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan yang bermutu pada semua jenjang. Selain itu, Permendikbud No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif menjadi acuan penting dalam penyelenggaraan layanan inklusi di sekolah. Dan Prinsip dan Pendekatan Inklusif, yang mana UNESCO (2005) menyatakan bahwa prinsip utama pendidikan inklusif adalah menghargai keberagaman, menghapus segala bentuk diskriminasi, dan memastikan partisipasi penuh semua siswa. Pendekatan pembelajaran yang inklusif mencakup Universal Design for Learning (UDL), Differentiated *Instruction* (DI), dan penggunaan Individualized Education Program (IEP) untuk siswa dengan kebutuhan khusus. Ini menjadi landasan analisis untuk memahami dinamika dan solusi mewujudkan pendidikan inklusif.

Manfaat penelitian ini adalah inovatif sebagai langkah dalam memberikan rekomendasi yang aplikatif bagi pembuat kebijakan, pendidik, dan masyarakat luas dalam memperkuat implementasi pendidikan inklusif. Penelitian ini berkontribusi menciptakan sistem pendidikan nasional yang lebih adil, setara, dan responsif terhadap kebutuhan semua peserta didik, sehingga mendukung pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan inklusif.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur, menganalisis perkembangan, tantangan, dan strategi implementasi pendidikan inklusif di Indonesia. Metode studi literatur dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan menganalisis berbagai sumber informasi yang relevan, termasuk artikel jurnal, buku, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan inklusif.

Proses dimulai penelitian dengan identifikasi sumber-sumber literatur relevan. Peneliti vang melakukan pencarian di berbagai database akademik, seperti Google Scholar dengan menggunakan kata kunci seperti "pendidikan inklusif", "anak berkebutuhan khusus". "tantangan pendidikan", dan "strategi implementasi". Sumber-sumber yang dipilih adalah yang diterbitkan dalam rentang waktu terakhir, yaitu dari tahun 2005 hingga 2025, untuk memastikan informasi yang diperoleh adalah terkini dan relevan dengan konteks pendidikan di Indonesia.

Setelah mengumpulkan literatur yang relevan, peneliti melakukan analisis kualitatif terhadap isi dari setiap sumber. Analisis ini mencakup pengidentifikasian tema-tema utama yang berkaitan dengan perkembangan pendidikan inklusif, tantangan yang dihadapi dalam

implementasinya, serta strategi yang telah diusulkan atau diterapkan. Peneliti mengevaluasi metodologi dan temuan dari penelitian-penelitian sebelumnya untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam literatur yang ada dan memberikan kontribusi baru dalam kajian ini.

Selanjutnya, peneliti menyusun hasil analisis dalam bentuk narasi yang sistematis, yang mencakup ringkasan temuan, diskusi mengenai tantangan yang dihadapi, serta rekomendasi strategi implementasi yang dapat diadopsi untuk meningkatkan pendidikan inklusif di Indonesia. Dengan pendekatan ini, ini dapat memberikan penelitian wawasan mendalam, komprehensif mengenai kondisi pendidikan inklusif Indonesia serta memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan di bidang pendidikan.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

- a. Hasil Penelitian
- Perkembangan Kebijakan dan Praktik Pendidikan Inklusif di Indonesia

Dalam dua dekade terakhir, pendidikan inklusif di Indonesia mengalami perkembangan signifikan, baik dari sisi regulasi maupun kesadaran masyarakat. Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmennya melalui beberapa kebijakan seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan Permendikbud Nomor 70 Tahun 2009 yang secara eksplisit mendukung pelaksanaan pendidikan inklusif.

Namun, seperti yang ditunjukkan oleh Rachmawati dan Prasetyo (2020), meskipun secara kuantitatif jumlah sekolah inklusi meningkat, belum semua sekolah benar-benar siap secara kualitas dalam menyelenggarakan layanan inklusif. Temuan ini diperkuat oleh data dari Direktorat Pendidikan Khusus, yang menunjukkan bahwa lebih dari 60% sekolah inklusi belum memiliki standar layanan minimal untuk mendukung anak berkebutuhan khusus (ABK).

Berdasarkan studi Sari dan (2021),sebagian Subagya besar sekolah belum memiliki tenaga pengajar dengan latar belakang pendidikan khusus, sehingga strategi pembelajaran yang dilakukan sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan individu siswa. Ketimpangan antara sekolah di perkotaan dan pedesaan juga masih menjadi masalah, di mana sekolah di daerah terpencil lebih tertinggal dalam hal infrastruktur, pelatihan guru, dan fasilitas pendukung.

2) Tantangan Utama

Tantangan utama dalam pelaksanaan pendidikan inklusif di Indonesia meliputi:

a) Sumber Daya Terbatas

belum Banyak sekolah dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti jalur kursi roda, ruang konseling, alat bantu belajar visual/auditif, dan ruang terapi. Serta BOS dana alokasi (Bantuan Operasional Sekolah) belum mengakomodasi kebutuhan spesifik pendidikan inklusif secara maksimal (Suharto, 2018).

b) Pelatihan Guru

Guru reguler sering merasa tidak percaya diri atau tidak memiliki kompetensi pedagogi inklusif. Pelatihan yang ada pun bersifat teoritis dan belum menyentuh praktik di lapangan (Marzuki & Wahyuni, 2022). Ditambah dengan tidak adanya standar nasional dalam pelatihan guru inklusif menyebabkan disparitas dalam kompetensi antarwilayah.

c) Stigma Sosial

Masih banyak masyarakat dan tenaga pendidik yang memandang ABK sebagai "beban" atau "penghambat" dalam proses pembelajaran. Berdasarkan penelitian (2021),Putri menyebutkan bahwa siswa ABK sering mengalami perlakuan diskriminatif dari teman sebaya, guru, maupun masyarakat.

3) Strategi Implementasi yang Berhasil

Studi-studi terbaru menunjukkan adanya sejumlah strategi yang dapat mendorong efektivitas implementasi pendidikan inklusif adalah sebagai berikut.

a) Model Kolaboratif Guru

Widodo dan Hartati (2022)menemukan bahwa kolaborasi antara guru reguler dan GPK meningkatkan pencapaian akademik keterlibatan siswa ABK. Kolaborasi ini mencakup perencanaan pembelajaran bersama, co-teaching, terhadap dan evaluasi bersama kemajuan siswa.

b) Pelibatan Orang Tua dan Komunitas

Iskandar (2023) menekankan pentingnya keterlibatan orang tua dalam proses pendidikan anak. Sekolah inklusi yang membuka ruang komunikasi aktif dengan keluarga ABK lebih berhasil dalam membangun lingkungan belajar yang suportif.

c) Teknologi Adaptif

Penggunaan teknologi bantu seperti text-to-speech, speech-to-text, aplikasi edukasi berbasis AI, dan elearning dengan fitur aksesibilitas menjadi solusi dalam menjembatani kesenjangan akses pembelajaran bagi siswa disabilitas. Program seperti Rumah Belajar Kemdikbud telah mulai mengintegrasikan fitur ini meskipun belum optimal.

d) Reformasi Kurikulum LPTK

Yuliana & Santoso (2023) menyatakan bahwa pelatihan guru harus diarahkan pada pengalaman praktik di sekolah inklusi. Kurikulum LPTK harus menyertakan mata kuliah wajib tentang pedagogi inklusi dan praktik magang di sekolah inklusi yang sesungguhnya.

b. Pembahasan

Kesenjangan antara Kebijakan dan Praktik

Secara normatif, kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia telah dibingkai dengan baik melalui berbagai regulasi nasional. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 memberikan dasar legal yang kuat

untuk menjamin akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) dalam sistem sekolah reguler. Namun, realitas di lapangan masih menunjukkan adanya jurang yang signifikan antara regulasi dan implementasi.

Seperti disampaikan oleh Nugroho (2020), "gap antara regulasi dan implementasi terletak pada aspek sumber daya dan supervisi yang minim dari pemerintah daerah." Banyak sekolah yang ditunjuk sebagai sekolah inklusi tidak benar-benar siap secara sarana, tenaga pendidik, maupun budaya organisasi. Misalnya, dalam evaluasi yang dilakukan oleh Kemdikbudristek tahun 2022, lebih dari 40% sekolah inklusi tidak memiliki Guru Pendamping Khusus (GPK) dan belum pernah mendapatkan pelatihan inklusi secara khusus. Selain itu, evaluasi implementasi seringkali administratif. bukan substantif. Supervisi dinas pendidikan daerah cenderung terbatas pada pelaporan formal. bukan pembinaan teknis pembelajaran inklusif. proses Ketidakkonsistenan antarwilayah memperparah ketimpangan layanan, sehingga siswa ABK di daerah tertinggal sangat rentan terabaikan haknya.

2) Studi Perbandingan Internasional

Penerapan pendidikan inklusif di berbagai negara maju dapat menjadi acuan dalam merumuskan strategi yang lebih adaptif dan berkelanjutan di Indonesia. Salah satu contoh terbaik adalah Finlandia, di mana sistem pendidikan didesain untuk inklusif sejak awal, bukan sebagai kebijakan tambahan. Pelatihan guru di Finlandia mencakup keterampilan dalam mengelola keragaman kebutuhan siswa serta pendekatan personalisasi pembelajaran yang kuat.

Booth dan Ainscow (2016)menekankan bahwa keberhasilan pendidikan inklusif di Eropa bergantung pada keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, pemerintah, sekolah, termasuk keluarga, dan masyarakat. Mereka memperkenalkan konsep Index for Inclusion, yang bukan hanya mengukur hasil akademik, tetapi juga menilai partisipasi dan rasa kepemilikan siswa terhadap sekolah. Di Italia, strategi inklusi melibatkan coteaching antara guru reguler dan guru spesialis, serta penggunaan teknologi adaptif dalam pembelajaran. Dukungan legislatif diperkuat dengan pelatihan wajib bagi semua guru tentang disabilitas dan strategi

diferensiasi. Pelajaran penting dari praktik internasional adalah bahwa pendidikan inklusif membutuhkan komitmen sistemik, bukan hanya dari segi kebijakan, tetapi pembiayaan, kurikulum, pelatihan guru, dan pengawasan yang berkelanjutan.

3) Peluang Perbaikan dan Inovasi

Meskipun tantangan masih besar, terdapat banyak peluang yang dimanfaatkan untuk memperkuat pendidikan inklusif di Indonesia, khususnya melalui inovasi teknologi dan reformasi pendidikan guru. Salah satu inovasi yang menjanjikan adalah teknologi penggunaan berbasis kecerdasan buatan (AI) dan teknologi untuk mendukung adaptif pembelajaran siswa disabilitas. Misalnya, aplikasi speech-to-text untuk siswa dengan hambatan bicara dan aplikasi text-to-speech bagi siswa tunanetra sudah mulai digunakan di beberapa sekolah. Pengembangan platform digital seperti Rumah Belajar Kemdikbud juga dapat diadaptasi lebih inklusif.

Di sisi lain, reformasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) sangat krusial. Menurut Yuliana dan Santoso (2023), pelatihan berbasis praktik melalui teaching internship di sekolah inklusi jauh lebih efektif daripada pelatihan teoritis. Calon guru yang memiliki pengalaman langsung dalam menangani siswa ABK menunjukkan tingkat kepekaan, keterampilan adaptif, dan empati yang lebih tinggi.

Peluang perbaikan juga dapat datang dari kolaborasi dengan LSM dan komunitas penyandang disabilitas dalam proses penyusunan kurikulum dan penilaian. Masyarakat sipil yang terlibat secara langsung akan mampu memberikan masukan berbasis kebutuhan nyata di lapangan.

D. Kesimpulan

Penelitian ini mengungkap bahwa pendidikan inklusif di Indonesia telah memiliki dasar hukum dan kebijakan yang relatif kuat, namun implementasinya masih menghadapi tantangan signifikan di lapangan. Kesenjangan antara kebijakan dan praktik terjadi akibat minimnya sumber daya, belum meratanya pelatihan infrastruktur guru, terbatasnya pendukung, serta masih kuatnya sosial terhadap stigma anak berkebutuhan khusus (ABK).

Melalui telaah literatur, ditemukan strategi implementasi yang efektif mencakup kolaborasi antara guru reguler dan guru pendamping

khusus, pelibatan orang tua dan komunitas, pemanfaatan teknologi adaptif, serta reformasi kurikulum di LPTK untuk memperkuat pelatihan Selain berbasis praktik. itu, perbandingan dengan praktik negara maju seperti Finlandia dan Italia bahwa keberhasilan menunjukkan pendidikan inklusif sangat dipengaruhi integrasi kebijakan lintas sektor. pelatihan guru berkelanjutan, dan partisipasi masyarakat menyeluruh.

Peluang perbaikan Indonesia terbuka lebar. terutama melalui inovasi teknologi pendidikan, penguatan budaya sekolah yang menghargai keberagaman, serta sinergi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan holistik yang menyatukan dimensi kebijakan, kultural, teknis, dan kelembagaan agar pendidikan inklusif tidak hanya menjadi wacana, tetapi juga realitas yang adil dan merata bagi semua peserta didik.

DAFTAR PUSTAKA

Amalia, N., & Kemal, I. (2022). Penggunaan Model Learning Start With Question dalam Menulis Kesimpulan Informasi. Fon: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia, 18(2), 323–330.

- https://doi.org/10.25134/fon.v18i2 .5782
- Ainscow, M., & Miles, S. (2009). Developing inclusive education systems: How can we move policies forward? Prospects, 39(3), 273–282.
- Booth, T., & Ainscow, M. (2016). The Index for Inclusion: A Guide to School Development. Bristol: CSIE.
- Iskandar, R. (2023). Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan Inklusif. *Jurnal Pendidikan Khusus*, 19(1), 35–48.
- Marzuki, M., & Wahyuni, D. (2022). Analisis Kompetensi Guru dalam Pembelajaran Inklusif. *Jurnal Inklusi Pendidikan*, 7(2), 15–27.
- Nugroho, Y. (2020). Tantangan Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 9(1), 45–59.
- Putri, D. (2021). Persepsi Masyarakat terhadap Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Umum. *Jurnal Psikologi Pendidikan*, 11(2), 90– 102.
- Rachmawati, E., & Prasetyo, D. (2020). Evaluasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 26(3), 221–233.
- Sari, M., & Subagya, Y. (2021). Kesiapan Sekolah dalam Menyediakan Layanan Pendidikan Inklusif. *Jurnal Pendidikan Luar Biasa*, 18(2), 55–66.
- Suharto, E. (2018). Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Sosial: Perspektif Kesejahteraan Sosial

- dalam Pendidikan. Bandung: Refika Aditama.
- UNESCO. (2005). Guidelines for Inclusion: Ensuring Access to Education for All. Paris: UNESCO.
- Widodo, A., & Hartati, T. (2022). Model Kolaboratif dalam Pendidikan Inklusif. *Jurnal Inovasi Pendidikan*, 10(1), 12–24.
- Yuliana, S., & Santoso, A. (2023). Efektivitas Pelatihan Praktik dalam Meningkatkan Kompetensi Guru Inklusif. *Jurnal Pelatihan Pendidikan*, 5(1), 45–59.